

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jenis dan Kegiatan Usaha Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawab kepada masyarakat, perbankan syariah harus selalu tanggap, sehingga mampu menghadapi perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks dan maju.

2.1.1 Jenis Bank

Berdasarkan jenisnya, bank terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR.). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut status kegiatan operasionalnya bank umum dibedakan menjadi bank umum devisa dan bank umum bukan devisa. Bank umum devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukkan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri. Berdasarkan kepemilikan, bank di Indonesia dapat dibedakan menjadi : Bank Persero, Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional dan Bank Asing. Menurut Shelagh Heffermen (1998), bank umum dibedakan dalam 4 jenis yaitu: Bank umum yang terintegrasi secara penuh dalam pemberian jasa kepada nasabahnya. Bank

umum yang memberikan jasa pada *entity* tertentu (contoh *mortgage banking*, *leasing* dan asuransi). Bank yang memfokuskan diri pada kegiatan tertentu contohnya *investment banking* dan bank dengan struktur *holding company*.

Kedudukan perbankan syariah dalam tata hukum perbankan Indonesia, diatur dalam UU No. 10/Tahun 1998. Terbitnya UU No. 10/1998 ini sangat melegakan bagi pelaku bisnis dan nasabah bank syariah, mengingat sejak beroperasi Bank Syariah Indonesia di tahun 1992 yang mencantumkan Bank Syariah sebagai bank bagi hasil, namun Bank Syariah itu masih harus tunduk pada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional.

Implikasi yang juga diterapkan dengan diberlakukannya UU No. 10/1998 ini, adalah munculnya *dual system banking* di Indonesia, yaitu perbankan yang memberlakukan dua sistem secara sekaligus, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Sistem *dual banking* seperti ini sebenarnya sudah cukup lama berlaku di negara lainnya, seperti Malaysia, Pakistan, Mesir, Bahrain dan sebagainya.

UU No. 10 Tahun 1998 itu juga dilengkapi dengan ketentuan pelaksanaannya, melalui beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 12 Mei 1999, yaitu No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat dan No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan prinsip syariah.

2.1.2. Bank Syariah Sebagai Alternatif Selain Perbankan Sistem Bunga

Lahirnya Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti sistem bunga pada bank-bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam yang tidak menyetujui sistem perbankan konvensional yang berbasiskan pada sistem bunga (yang menurut fatwa dari MUI pada akhir tahun 2003 telah dinyatakan bahwa bunga bank adalah haram) untuk dapat memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan

didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.

Bank yang berdasarkan syariah Islam (Bank Syariah) adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi perbankan mengikuti tata cara syariah Islam. Sistem Ekonomi Islam didasarkan pada ajaran bahwa tidak seorangpun yang boleh mengklaim bahwa kekayaan yang dimiliki menjadi hak absolut. Karena semua kekayaan berasal dari Allah yang dititipkan kepada manusia yaitu tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan keadaan sosial-ekonomi. Seperti dikemukakan Rahman (1998) : *The objective of syariah is to ensure general human well being and socio-economic justice*".

Seseorang hanya boleh menggunakan kekayaan sesuai dengan tuntunan dari Allah atas kekayaan mereka terdapat hak orang lain yang membutuhkan, sehingga memaksimumkan kekayaan yang menjadi tujuan ekonomi kapitalis, bukan menjadi tujuan utama ekonomi Islam seperti yang dinyatakan oleh Crane (1983) : *"Western economists generally can not conceive of any measure that extends beyond the material world, where as Muslims generally can not conceive of any measure that does not"*.

Kegiatan Bank Syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan ciri-ciri yang menonjol yaitu pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, dan konsep uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan. Menurut Ali (1994) : *"Islamic banks have to operate under strict religious guidelines, which are based on differem principles than those of conventional banks"*.

Lebih jauh Ali menguraikan beberapa prinsip bank Syariah sebagai berikut:

1. *Prohibition of interest in all forms of transactions.*
2. *Undertaking business and trade activities on the basis affair and legitimate profits.*
3. *Payment of "the poor due" (zakat) from their operations.*
4. *Prohibition of monopoly.*

5. *Cooperatian in the development of society, by investing only in business and trades which are not prohibited by Islam.*

2.1.3. Bank Tanpa Bunga (*Interest Free Banking*)

Salah satu prinsip Bank Syariah yang membedakannya dari Bank Konvensional adalah tidak membenarkan adanya bunga dalam setiap transaksi yang terjadi. Lembaga yang berfungsi memobilisasi dana masyarakat, Bank Syariah tidak mengakui hasil yang diterima di muka yang bersifat tetap, seperti bunga pinjaman, karena merupakan riba.

Salah satu alasan tidak dibolehkan adanya bunga adalah, bahwa seseorang yang menerima hasil yang tetap dan pasti dalam bentuk bunga tidak menanggung resiko apapun, yang menjadi komponen utama dari suatu usaha. Siapapun yang ingin mendapatkan hasil (*return*) atas modal mereka harus bersedia menanggung sejumlah resiko seperti rugi. Secara umum perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2.1. Perbandingan Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional

No.	BANK SYARIAH	BANK KONVENSIONAL
1	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasinya bercampur, yang halal dan yang haram
2	Berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa	Memakai perangkat bunga (sebagai acuan investasi)
3	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
4	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor
5	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa	Tidak terdapat Dewan sejenis

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Hlm 34

Lebih lanjut, Muhammad Syafi'i Antonio dalam buku *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* menyatakan dua perbedaan mendasar antara investasi dengan membungakan uang:

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian *return* (imbal hasil)nya tidak pasti dan tidak tetap. Berpegang pada prinsip tidak ada hasil tanpa resiko (*no risks no gains*).
2. Membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena *return* yang diperolehnya berupa bunga adalah relatif pasti.

Bunga merupakan salah satu penyebab utama terciptanya pembagian kekayaan yang tidak merata. Bunga yang pasti (ditetapkan di muka), menjamin suatu keuntungan atas uang yang disimpan atau dipinjamkan, tanpa memperhatikan apakah si peminjam memperoleh untung atau rugi. Bukan tidak mungkin seorang karyawan dan orang-orang yang telah bekerja keras tidak mendapatkan imbalan yang seimbang, sementara pemilik modal atau yang meminjamkan modal yang tidak ikut serta terlibat berusaha atau bekerja dengan si peminjam tidak mengalami penyusutan nilai dari penggunaan modal mereka dan dijamin untuk memperoleh hasil yang pasti. Dan hal ini oleh Islam dianggap sesuatu yang tidak adil.

2.1.4. Sistem Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) pada Bank Syariah

Berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1998 dalam ayat 3 yang berbunyi: "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".

Walaupun secara eksplisit dinyatakan bahwa di Indonesia mempunyai dua prinsip namun pada dasarnya fungsinya adalah sama yaitu (fungsi utama) perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun

dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan fungsi tersebut di atas, maka terlihat adanya dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu: **Pertama**, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpanan dana, dan **Kedua**, hubungan hukum antara nasabah peminjam dana.

Dalam bank syariah, dari masing-masing hubungan hukum di atas tidak hanya sekedar berhubungan seperti itu saja melainkan ada asas-asas khusus sehingga bukan sekedar hubungan kontraktual biasa. Hubungan antara bank syariah dengan nasabah sebagai pemilik rekening investasi tidaklah mencerminkan hubungan kreditur-debitur.

Aransemen *profit sharing* atau bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* sendiri sudah ada sebelum datangnya Islam. Di Timur Tengah pra-Islam, kemitraan bisnis yang berdasarkan konsep *mudharabah* telah berjalan berdampingan dengan konsep pinjaman sistem bunga sebagai cara untuk membiayai berbagai aktivitas ekonomi (Crone, 1987; Kazarian, 1991; Cizaka, 1995). Setelah kedatangan Islam, transaksi keuangan berbasis bunga pun dilarang dan semua dana harus disalurkan atas dasar bagi hasil.

Bank syariah tidak menjamin keuntungan di awal transaksi, tetapi keuntungannya ditentukan sesuai dengan sifat dan jangka rekening investasi dan sesuai dengan hasil operasional investasi sebagai obyek. Bank syariah tidaklah harus mengembalikan kepada pemilik dana, simpanan mereka secara utuh pada tanggal jatuh tempo, karena secara prinsip para nasabah menerima prinsip "Musyarakah" yang mungkin melaba atau merugi. Begitu juga dengan prinsip operasional lainnya. Di pihak lain, pemilik deposito berjangka di bank-bank konvensional adalah kreditur yang mempercayakan dananya kepada bank. Bank bertanggung jawab mengembalikan deposito pada tanggal jatuh tempo di samping bunga tetap atau bunga yang disepakati. Tidak ada hubungan minimal, langsung atau tidak langsung antara pemilik deposito berjangka, dengan bentuk jenis investasi di bank, tingkat kualitas investasi dan tingkat kerugian atau keuntungan yang dicapai. Secara ringkas perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil dapat dilihat pada tabel:

2.2. Perbedaan Antara Sistem Bunga dan Sistem Bagi Hasil

No.	BUNGA	BAGI HASIL
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4	Jumlah pendapatan bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan sedang booming	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*. Hlm 61

2.1.5. Sejarah Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Tbk yang lebih dikenal dengan Bank Muamalat (BMI) (selanjutnya disebut perseroan), merupakan bank pertama yang menggunakan prinsip secara syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian no.1 tanggal 1 November 1991 Masehi/24 Rabiul awal 1412 H yang dibuat dihadapan Yudho Paripurno SH notaris Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan Menteri kehakiman Republik

Indonesia No.34 tanggal 28 April 1992 tambahan n0.1919A.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir Akta no.29 tanggal 28 Mei no.29. berdasarkan surat Keputusan menteri Keuangan RI no. 430/KMK013/1992. Perseroan telah mendapat ijin untuk beroperasi sebagai bank umum dengan status sebagai bank devisa. Perseroan diijinkan untuk melakukan transaksi valuta asing, diperoleh pada tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan no. 131 KMK 017/1995 tanggal 30 Maret 1995. Perseroan dinyatakan sebagai bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil, status sebagai bank persepsi, yang mengijinkan bank syariah menerima setoran-setoran pajak diperoleh pada tanggal 7 Maret 1995 dengan nomor 5-06/MK.03/1995 dengan demikian perseroan ini merupakan bank umum syariah devisa pertama di Indonesia dan beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai ketentuan syariah Islam.

Sebagai perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki oleh masyarakat, sekalipun tidak tercatat dibursa efek, Bank Muamalat tunduk pada perundang-undangan dan peraturan pasar modal termasuk ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan perusahaan terbuka.

Sebagai suatu kebijakan tata kelola perusahaan yang relatif baru di lingkungan pasar modal maupun dunia usaha Indonesia pada umumnya, prinsip-prinsip GCG sebagaimana telah mulai diterapkan oleh sebagian besar perusahaan terbuka Indonesia, belum diterapkan secara formal oleh Bank Muamalat. Namun, bila kita merujuk pada prinsip-prinsip GCG sebagaimana dirumuskan oleh Komite Nasional Kenijakan Corporate Governance, yaitu keterbukaan (*transparency*), tanggung jawab (*responsibility*), keadilan (*fairness*), dan akuntabilitas (*accountability*), sesungguhnya semangat dari prinsip-prinsip GCG tersebut bukan merupakan hal yang baru atau sama sekali asing bagi Bank Muamalat maupun nilai-nilai utama yang dianutnya. Sejak didirikan 16 tahun yang

lalu, landasan usaha BMI adalah hukum Islam yang antara lain juga menjunjung prinsip-prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan, kesejahteraan, dan keberpihakan pada kelompok maejinal atau minoritas. Bahkan konsep yang mendasari sistem ekonomi atau perbankan syariah itu sendiri sesungguhnya mengandung unsur-unsur kepatuhan, pengawasan melekat, pengendalian resiko maupun good corporate governanace yang merupakan bagian dari falsafah Islami Kendati Bank Muamalat tidak mengalami kerugian akibat *negative spread* seperti yang dialami bank-bank konvensional pada saat krisis ekonomi 1997, namun kinerja keuangannya mengalami penurunan akibat adanya fasilitas pembiayaan bermasalah (data keuangan tahun 1998), yang pada balas jasa dari pembiayaan yang diberikan dan akhirnya menimbulkan rugi operasional. Oleh karena itu, manajemen merumuskan tujuan dan strategi sampai tahun 2004, yang dipusatkan pada revitalisasi kinerja keuangan perseroan. Pada tahun 2000, target perseroan adalah mencapai setidaknya *break-even* dalam pendapatan operasional. Tujuan ini penting sebagai dasar dimasa depan dan mencapai posisi keuangan yang sehat sebagaimana disyaratkan oleh Bank Indonesia.

Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan dua upaya besar oleh perseroan sepanjang tahun 2000. Pertama, menarik margin yang belum dibayar dari fasilitas pembiayaan yang bermasalah dan kedua adalah mempercepat penyaluran pembiayaan baru untuk meningkatkan pendapatan margin. Untuk mendukung upaya terakhir, perseroan merubah paradigmanya menjadi lebih berorientasi kepada pasar, Maksudnya Bank Muamalat tidak lagi hanya membawa benefit emosional saja, tetapi juga menawarkan benefit fungsional sebuah bank seperti yang dikehendaki pasar/konsumen.

Struktur organisasi disederhanakan dengan memotong jalur birokrasi, terutama dilevel menengah. Karena merupakan bank syariah pertama yang harus menciptakan sendiri sumber daya insani-nya, untuk itu selain untuk mempercepat jalur birokrasi dan membuka *bottle-neck* juga berasaha memberdayakan karyawan untuk menempati jenjang hirarki

ketika perusahaan membutuhkannya dicabang-cabang. Banyak karyawan departemen operasional menjalin pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka sebagai pemasar dan merelokasikan mereka ke dalam unit bisnis strategis.

Sebagai pelopor bank syariah di Indonesia, nama Bank Muamalat cukup dikenal dikalangan masyarakat, terutama dikalangan "*emotional market*" yaitu pasar dimana konsumen tidak terlalu memperdulikan kebutuhan gaya hidup dan modemitas dalam perbankan tapi lebih mengedepankan menjalankan ibadah syariat . Namun terlepas dari hal itu, perseroan membutuhkan strategi diferensiasi yang kuat di tengah konsolidasi perbankan syariah yang baru, Perseroan memilih untuk diri sebagai "bank dengan nilai sesungguhnya, bank yang benar-benar berfungsi sebagai lembaga intemediasi antara nasabah investor dan nasabah pengusaha dalam menjalankan ekonomi dalam produksi riil serta tidak bermain dalam instrument keuangan (profit non-operasional). Sebagai konsekuensinya, perseroan secara terus-menerus meningkatkan kapabilitasnya untuk menerapkan keadilan dalam isi, ketulusan dalam konteks dan Transparansi dalam infrastruktur.

Program pengembangan kapabilitas mencakup tiga aspek. Pertama, memberdayakan seluruh karyawan didalam organisasi untuk menjadi lebih dekat dengan nasabah dengan membuat struktur organisasi menjadi lebih flat. Kedua, memperbaiki proses operasional dengan mengoptimalkan teknologi. Ketiga, memfokuskan seluruh produk dan strategi (strategi penjualan dan promosi) untuk memenangkan target perseroan.

Kinerja Bank Muamalat sangat tergantung pada kinerja pembiayaan sektor riil. Menyadari hal ini, perseroan menerapkan persetujuan serta pengawasan pembiayaan yang ketat untuk memastikan dicapainya kualitas pembiayaan yang sehat. Perseroan juga memberlakukan beberapa lapisan pengamanan sebelum menyetujui suatu fasilitas pembiayaan baru. Tidak hanya itu, perseroan juga sangat ketat dalam mendefinisikan target pasar kreditnya yaitu hanya disalurkan ke

sektor-sektor yang memiliki daya tahan tinggi terhadap krisis. Mayoritas dari fasilitas pembiayaan diberikan dalam bentuk *mudharabah* dan *murabahah*, dan disalurkan kepada perusahaan berskala kecil.

Dalam upaya untuk mendukung pertumbuhan dana pihak ketiga, perseroan memfokuskan pada upaya menjual produk tabungan ke konsumen ritel di *emotional market*. Saat ini, perseroan hanya memusatkan kegiatan promosinya pada produk utamanya yaitu tabungan *Mudharabah* yang disebut Tabungan Umat, dan produk Tabungan Haji *Arafah*. Pada tahun 2000, total nasabah untuk masing-masing adalah lebih dari 1600 dan 1300, Bank Muamalat secara intensif mengembangkan program retensi dalam rangka mempertahankan loyalitas nasabah dengan memperbaiki semua pelayanannya terutama Muamalat *Personal Services* yang menekankan pada sentuhan Islam yang prima. Sehingga Pada Agustus 2001, Bank Muamalat meraih ISO 9002.

2.2. Pengelolaan Dana Bank

Funds management merupakan proses pengelolaan dana dalam rangka memaksimalkan selisih antara pendapatan dan biaya, dengan tetap menjaga kecukupan likuiditas bank. Dalam pengelolaan dana tersebut terdapat komponen penting yang perlu diperhatikan yaitu likuiditas.

2.2.1. Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi semua kewajibannya, dan sebuah bank dikatakan mempunyai likuiditas yang cukup apabila dapat menyediakan dana untuk memenuhi kewajibannya. Pemenuhan penyediaan dana tersebut dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan *liabilitasnya* atau melakukan *konversi* asetnya dengan biaya tertentu yang dapat diterima. Memiliki likuiditas yang cukup sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan usaha bank disamping dapat memelihara kepercayaan masyarakat. Kebutuhan likuiditas antara satu bank berbeda dengan bank lainnya tergantung pada antisipasi kebutuhan dana bank masing-masing. Sejumlah alat likuid yang memadai bagi suatu bank

mungkin tidak cukup bagi bank lain, mengingat hal tersebut sangat tergantung pada analisis bank yang bersangkutan mengenai:

1. Perkembangan kebutuhan dananya
2. Posisi likuiditas
3. Antisipasi kebutuhan dana dimasa yang akan datang
4. Sumber dana yang dimiliki

Penyediaan dana untuk keperluan likuiditas dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mencairkan aktiva lancar
- b. Meningkatkan pinjaman jangka pendek
- c. Menurunkan pinjaman pada aktiva yang tidak likuid
- d. Meningkatkan modal bank

Proyeksi kebutuhan dana merupakan suatu hal yang perlu dilakukan dalam menetapkan kebijakan likuiditas bank dan strategis pencairan dananya, sebab apabila hal ini tidak mendapat perhatian manajemen maka bank akan lebih banyak dikendalikan oleh keadaan perekonomian daripada oleh manajemennya sendiri

2.2.2. Likuiditas Bank Syariah

Likuiditas Bank syariah banyak bergantung pada :

- a. Tingkat kelabilan (*volatility*) dari simpanan (*deposit*) nasabah; kepercayaan pada dana-dana non-PLS
- b. Kompetensi teknis yang berhubungan dengan pengaturan struktur liabilitas
- c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas
- d. Akses kepada pasar antarbank dan sumber dana lainnya, fasilitas *lender of last resort* dari bank sentral.

Di sisi lain, kualitas *earning assets* Bank syariah akan bergantung pada beberapa hal:

1. Level, distribusi dan tingkat kesulitan dari aset
2. Level dan komposisi dari berkurangnya nilai aset
3. Kecukupan dari cadangan penilaian kembali

4. Bukti adanya kemampuan untuk mengadministrasikan dan memperoleh kembali pembiayaan bermasalah.

2.3. Kerangka Konseptual

Pada bagian kerangka konseptual ini berisi penjelasan secara teoritis teori ekonomi makro (inflasi, kurs, dan SBI) mengenai hubungan antara variabel yang digunakan dalam penelitian dengan perumusan masalah pada bab 1. Selain penjelasan mengenai hubungan antar variabel, pada bagian ini juga menjelaskan mengenai pandangan Islam terhadap inflasi, kurs, jumlah uang beredar dan bunga.

Al-Maqrizi (Huda 2008:190) membagi inflasi ke dalam dua macam, yaitu inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama inilah yang terjadi pada zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, yaitu karena kekeringan atau karena peperangan. Inflasi akibat kesalahan manusia disebabkan oleh tiga hal, yaitu korupsi dan administrasi yang uruk, pajak yang memberatkan, serta jumlah uang yang beredar berlebihan. Kenaikan harga-harga yang terjadi adalah dalam bentuk jumlah uangnya, bila dalam bentuk dinar jarang sekali terjadi kenaikan. Al-Maqrizi mengatakan jumlah uang dibatasi hanya pada tingkat minimal yang dibutuhkan untuk transaksi pecahan kecil saja. Sehingga pada dasarnya inflasi yang terjadi pada saat ini dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dan fungsi uang itu sendiri dalam sistem ekonomi konvensional.

Inflasi yang terjadi memberikan hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, menurut Barro dalam Sahminam (2006) cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi. Beberapa jalur utama bagaimana inflasi membebani pertumbuhan ekonomi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Pertama*, karena perusahaan cenderung tidak merubah harga pada saat yang bersamaan dengan inflasi, Maka harga relatif antara barang-barang akan berubah. Hal ini pada gilirannya membuat hubungan konsumen dan perusahaan terganggu, yang berujung pada efisiensi perekonomian.
2. *Kedua*, inflasi akan lebih mempersulit rumah tangga untuk merencanakan tabungan untuk hari depan, ataupun pembelian rumah atau barang-barang yang tahan lama melalui angsuran.

3. *Ketiga*, inflasi yang tinggi cenderung lebih bergejolak dan menimbulkan ketidakpastian yang lebih besar. Hal ini akan membuat seseorang atau perusahaan tidak mau berinvestasi. Selain itu inflasi juga menyebabkan redistribusi kekayaan yang cenderung merugikan penduduk yang lebih miskin. Intinya, inflasi memperburuk pemerataan kekayaan (Sahminan, 2006).

Hasan (2005) membahas mengenai inflasi mata uang. Salah satu permasalahan ekonomi sekarang, yang ilmu ekonomi sendiri tidak mampu menginterpretasikan secara jelas dan tepat, serta memberikan solusi yang tepat untuk mencegah terjadinya dampak negatif, adalah masalah inflasi mata uang. Bahkan, ketidakmampuan ini telah diakui oleh pakar ekonomi barat sendiri.

Elih dan Hasan (2005) mengatakan: *“Problem terbesar yang dihadapi oleh perekonomian pasar barat yang tidak terselesaikan sampai sekarang adalah pergolakan perekonomian dan perubahan-perubahan nilai harga nilai asli mata uang. Hal yang menjadi penghalang terhadap kemampuan ekonomi, keadilan pembagian income dan jaminan penggunaan terhadap sumber-sumber, dan ketenangan kehidupan sosial. Fakta membuktikan, bahwa ketidakadilan dan kecurangan besar yang dirasakan oleh masyarakat barat, datangnya dari perubahan dan perbedaan bentuk income yang timbul dari perubahan nilai harga asli mata uang.”*

Menurut Hasan (2005), sebab utama terjadi inflasi adalah kelebihan kuantitas uang kertas (*fiat money*) dari *backing* emas dan perak yang mengimbangnya. Sebab, selama mata uang kertas ini memiliki hubungan yang kuat dengan emas dan perak, maka bank-bank sentral akan selalu memperketat mengeluarkan mata uang kertas sesuai dengan persentase yang seimbang. Dari sini, inflasi dapat didefinisikan, bahwa ia adalah *“Kelebihan yang terjadi pada kuantitas mata uang kertas yang tidak diimbangi dengan kelebihan backing emas dan perak,”* atau *“Kenaikan nilai dari segi angka dari nilai harga sesungguhnya.”*

Namun, makna ini tidak disetujui oleh pakar ekonomi, karena tidak relevan lagi untuk masa sekarang. Sebab, mata uang kertas tidak lagi mempunyai

hubungan dengan emas, tetapi kekuatan nilai belinya hanya di ambil dari produk negara dan keseimbangannya dengan komoditi, layanan yang diberikan. Namun demikian, andaikata pendapat ini benar, tentunya tidak akan menemukan lagi fenomena inflasi di negara-negara industri maju.

Inflasi yang terjadi menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh kelompok masyarakat. Sebab inflasi akan merusak nilai keadilan yang disebabkan oleh kerugian terhadap hak-hak orang lain. Dampak negatif inflasi adalah sebagai berikut:

1. Dampak inflasi terhadap pengembalian pendistribusian *income* yang sesungguhnya. Pemilik *income* dikelompokkan menjadi dua yaitu orang yang memiliki *income* tetap (*permanent*) dan yang tidak tetap (*transitor*). Kedua kelompok ini dirugikan dengan adanya inflasi karena *income* yang mereka dapatkan nilainya menjadi turun dibandingkan dengan naiknya harga barang dan jasa.
2. Dampak yang ditimbulkan inflasi terhadap tuntutan keuangan yang berjangka. Tuntutan keuangan yang berjangka terdiri dari utang, penjualan dengan pembayaran berjangka, mas kawin yang berjangka, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori utang. Maka apabila terjadi kenaikan harga barang, dan anjloknya nilai beli mata uang, orang yang berutang merasa dirugikan. Sebaliknya, orang yang memberikan pinjaman merasa sangat diuntungkan.
3. Dampak inflasi yang ditimbulkan terhadap ahklak. Inflasi mata uang sangat berpengaruh negatif terhadap ahklak seseorang. Sebab, ia akan menyebarkan kerugian kepada masyarakat. Oleh sebab itu, ketika terjadi kenaikan pada harga barang, dan anjloknya nilai beli mata uang- sementara gaji pegawai pemerintahan tetap pada level yang ada biasanya mereka terpaksa untuk memenuhi kebutuhan materi dengan cara yang tidak dibenarkan, misalnya dengan cara manipulasi, kolusi, korupsi, dan praktek.

Chapra (Huda, 2008:232) menegaskan bahwa sistem keuangan dan sistem moneter yang berbasis suku bunga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi yang optimal, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Sebaliknya

sistem keuangan dan ekonomi yang bebas riba yaitu dengan menghindari suku bunga serta menerapkan prinsip *profit loss sharing* pada lembaga keuangan/perbankan dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan efisien. Terciptanya perekonomian yang stabil ini dikarenakan sistem syariah dapat mengeliminir dan melarang kegiatan-kegiatan non produktif, haram, berbahaya, tidak baik, dan spekulatif. Kondisi ini akan mendorong pada peningkatan pemanfaatan sumber daya, mengurangi tekanan inflasi serta menanggulangi krisis ekonomi sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan ekonomi yang telah direncanakan.

Dampak dari kenaikan suku bunga di samping mempersempit tingkat investasi (Keynes dalam Rahman 1995), juga menghambat pembangunan industri yang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan baik dalam suatu negara. Adanya bunga yang tidak kondusif bagi kemajuan ekonomi dan oleh karenanya bunga harus dikendalikan dengan undang-undang resmi bahkan dengan menerapkan sanksi hukum moral. Suatu kelemahan yang merusakkan kecenderungan untuk berinvestasi merupakan kejahatan sosial yang harus diberantas.

Bunga, jika tidak dilarang, akan mengurangi investasi sehingga akan berkurang juga pertumbuhan kekayaan masyarakat (Rahman, 1995 : hal 122). Suatu tingkat bunga yang lebih rendah akan mendorong meluasnya investasi modal dibanding pada tingkat bunga tinggi yang tidak memberikan keuntungan (Rahman, 1995 : hal 141).

Bila ditinjau dari sudut fiqh, menurut Qardhawi (Huda 2008:13), bunga bank sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Atas pendapat sebagian kalangan yang menghalakan bunga komersial (bunga dalam rangka usaha) dan mengharamkan bunga konsumtif (bunga dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari). Qardhawi menyatakan bahwa baik bunga komersil dan bunga konsumtif, keduanya haram. Bunga yang tidak memberikan manfaat dalam pandangan ekonomi Islam mengacu kepada Al-Quran yakni QS surah Ar-Ruum ayat 39.

Qs Ar-Ruum:39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

39. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Ruum : 39).

Berdasarkan firman Allah tersebut berarti riba (bunga bank konvensional) tidak menambah kebaikan pada sisi Allah. Dalam kegiatan perekonomian yang berbasis sistem bunga, bunga bank memberikan dampak yang terhadap perekonomian. Pada saat bunga rendah maka yang terjadi kegiatan konsumtif dan spekulasi akan mengalami peningkatan. Sedangkan pada saat bunga bank mengalami kenaikan maka berdampak terhadap sektor riil yang tidak dapat mengembangkan usahanya. Hal ini yang menyebabkan bunga bank tidak memberikan manfaat bagi perekonomian. Pendapat yang sama mengenai bunga yang tidak memberikan manfaat telah dikemukakan oleh Keynes pada bagian sebelumnya.

Fluktuasi suku bunga berhubungan dengan fluktuasi inflasi yang dikenal dengan *efek fisher*. *Efek Fisher* ini adalah penyesuaian suku bunga nominal terhadap angka inflasi. Ketika bank sentral memutuskan untuk mempercepat pertumbuhan penawaran uang, hasilnya adalah inflasi dan suku bunga nominal yang lebih tinggi (Mankiw, 2001). Kenaikan inflasi akan disikapi oleh Bank Indonesia dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga akan menurunkan investasi, penurunan investasi akan menurunkan GDP *output*, selanjutnya akan menurunkan konsumsi dan daya beli, sebagaimana diutarakan dalam Blanchard (2003). “*The increase in the interest rate decrease investment. The decrease in investment leads to decrease output, which further decrease consumption and investment. In other words, the initial decrease in investment leads to a larger decrease in output through the multiplier effect.*”

Chapra (2000) menyatakan hal yang berbeda, mengenai kebijakan yang

dilakukan oleh Bank Sentral (sistem ekonomi konvensional) menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga dalam rangka mengatasi inflasi. Menurutnya tingkat suku bunga baik rendah maupun tinggi sama saja. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menghukum para pengusaha, tingkat suku bunga yang rendah akan merugikan penabung yang menginvestasikan dana pada instrument berbasis bunga. Dengan menyalurkan hanya keuntungan gurem kepada para investor, terutama kepada investor kelas teri, tingkat bunga yang rendah telah menjadi sumber yang pasti terhadap penindasan jutaan depositan kecil dan melebarkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Tingkat bunga yang rendah juga merangsang pinjaman untuk tujuan-tujuan konsumsi oleh rumah tangga dan pemerintah. Karena itu, meningkatkan tekanan inflasioner. Tingkat suku bunga rendah telah merangsang konsumsi, mengurangi rasio tabungan kotor, mengurangi kualitas investasi, dan menciptakan kelangkaan modal (Chapra, 2000 : hal 74).

Rahman (1995) meringkas keburukan utama dari bunga, sebagai berikut:

1. Adanya tingkat bunga yang tinggi menghancurkan minat untuk berinvestasi. Tingkat investasi jatuh, kesempatan kerja dan pendapatan juga menurun. Sebagai akibat menurunnya jumlah pendapatan, tingkat konsumsi agregat juga menurun. Konsumsi merupakan satu-satunya tujuan dari seluruh kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, suatu penurunan tingkat investasi, juga berarti penurunan kesempatan kerja akan mengurangi permintaan barang terhadap barang serta produk-produk industri dan pertanian dalam suatu negara. Akibatnya kemajuan perdagangan dan industri sekaligus pertumbuhan modal di negara tersebut akan terhambat.
2. Bagaimanapun bunga ada dalam suatu sifat yang rumit untuk melemahkan perekonomian. Bagi orang yang memiliki uang untuk ditabung dan diinvestasikan, bunga memberi satu bentuk tunai. Mereka mendapat jaminan sejumlah persentase bunga tertentu tanpa berperan sama sekali dalam proses produksi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa uang yang mengendap di bank tersebut dapat dimanfaatkan untuk usaha industri dan komersial. tetapi dalam prakteknya pendapat tersebut dapat disangkal. Sebagian besar asset bank dialirkan untuk usaha-usaha non produktif. Hal ini menyebabkan

berkurangnya modal yang ada yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan produktif. Kekurangan modal akan menyebabkan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga menyebabkan semakin banyaknya aset-aset bank terarah pada jalur tunai dan tidak produktif, pada akhirnya akan menurunkan efisiensi marginal modal yang akan menimbulkan kenaikan harga barang. Dengan demikian, bunga menjadikan manusia semakin miskin dengan cara menghambat pertumbuhan modal dan merintangi perkembangan usaha-usaha yang produktif. Seperti yang dinyatakan oleh Cassel yang dikutip oleh Rahman (1995), *“Pertumbuhan modal riil terhambat oleh tingkat bunga dan apabila hambatan ini dihapuskan, Maka pertumbuhan modal riil akan begitu cepat.”* Sama halnya dengan pendapat Keynes yang menyatakan bahwa, *“Suku bunga tidak memberikan modal yang banyak seperti yang dipercayai orang, justru suku bunga sebagai suatu tindakan yang menghambat pembangunan dunia ke arah yang lebih maju.”*

3. Bunga menghancurkan kekayaan dengan berbagai cara. Bunga menimbulkan krisis ekonomi. Penyebabnya adalah adanya akumulasi barang karena rendahnya daya beli masyarakat dan kecenderungan untuk berkonsumsi yang juga rendah. Proses produksi akan terhambat, yang akhirnya akan menimbulkan pengangguran. Bunga memegang peran utama sebagai penyebab timbulnya krisis ekonomi.

Bunga memusnahkan kekayaan negara. Hal ini umumnya dialami oleh negara-negara kapitalis. Para produsennya bermaksud menghancurkan barang jadi dalam jumlah yang besar-bahkan terhadap hasil-hasil pertanian untuk meyelamatkan harga dari kejatuhan dibawah biaya marginal produksi. Negara mengalami kerugian dalam jumlah besar, ironisnya di sisi lain berjuta orang mengalami kelaparan dan kekurangan kebutuhan karena menurunnya daya beli masyarakat.

Bunga pada dasarnya tidak memberikan keberkahan kepada manusia dan menjauhkan manusia dari berkah yang diberikan oleh Allah dalam kekayaan yang diperoleh manusia melalui jalan bunga atau riba. Kenyataan ini telah tercermin dari dari keburukan atau dampak bunga pada pernyataan-pernyataan di atas.

Tingkat inflasi, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga secara langsung dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara (kurs). Hal ini dilihat dari sudut pandang pendekatan moneter, para ekonom (Mac Donald dan Taylor, 1992 : halaman empat dan Tucker et.al (1991)) pada umumnya melihat kurs valuta asing dipengaruhi oleh variabel fundamental ekonomi, antara lain jumlah uang beredar, tingkat *output* riil, tingkat suku bunga dan inflasi.

Mankiw (2001 : hal 132) mengemukakan: *“Jika suatu negara memiliki tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi terhadap Amerika Serikat, satu dollar akan membeli jumlah mata uang asing yang semakin lama semakin banyak sepanjang waktu. Jika suatu negara memiliki tingkat infalsi yang relatif lebih rendah terhadap Amerika Serikat, satu dolar akan membeli jumlah mata uang asing yang semakin lama semakin sedikit sepanjang waktu.”*

Analisis ini menunjukkan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi kurs nominal. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi menyebabkan inflasi yang tinggi. Dengan kata lain, bila pertumbuhan jumlah uang beredar meningkatkan harga barang yang di ukur dengan uang, pertumbuhan ini cenderung meningkatkan harga mata uang asing yang di ukur dalam kurs mata uang domestik. Perubahan nilai mata uang asing ini akan mendorong timbulna kegiatan spekulasi, yang tentu saja menyebabkan terjadi fluktuasi pada nilai kurs.

Dalam pandangan ekonomi Islam, jumlah uang beredar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Permintaan dan penawaran uang harus didasarkan pada transaksi yang mendorong bergeraknya sektor riil. Sebab dalam pandangan Islam uang hanyalah alat untuk bertransaksi semata. Bukan digunakan sebagai alat spekulasi. Sedangkan permintaan dan penawaran uang dengan tujuan berjaga-jaga diperbolehkan sebatas memperkirakan akan timbulnya biaya diluar kebutuhan yang telah ditetapkan (darurat).

Pengaruh kurs terhadap kondisi makro ekonomi berhubungan dengan tingkat harga yang berlaku. Yang mempengaruhi perilaku nasabah dalam menabung dan permintaan terhadap pembiayaan/kredit dalam menyikapi fluktuasi nilai kurs. Mankiw (2001 : hal 125) menyatakan:

“Jika kurs riil tinggi, barang-barang dari luar negeri relatif lebih murah, dan barang-barang domestik lebih mahal. Jika kurs riil rendah, barang-barang dari

luar negeri relatif lebih mahal, dan barang-barang domestik relatif lebih murah.”

Dari pernyataan yang telah dikemukakan di atas, fluktuasi yang terjadi pada salah satu variabel ekonomi makro yang digunakan dalam penelitian ini menyebabkan ikut berfluktuasinya variabel yang lain. Dengan demikian terjadi hubungan yang simultan antar variabel ekonomi makro. Sebab perubahan dari salah satu variabel akan menyebabkan ikut berubahnya variabel yang lain.

Tabungan dapat terjadi apabila terdapat kelebihan pendapatan, apabila harga barang mengalami kenaikan mengakibatkan pendapatan riil masyarakat mengalami penurunan. Sehingga seluruh pendapatan yang diperoleh dipergunakan untuk konsumsi. Selain itu, permintaan pembiayaan/kredit mengalami penurunan dikarenakan biaya produksi mengalami kenaikan sehingga mengakibatkan penurunan laba yang diperoleh. Tentunya hal ini bukan sesuatu yang menarik bagi para pengusaha dalam mengembangkan usahanya.

2.4. Studi Literatur

Metode *Vector Autoregressive* (VAR) telah banyak digunakan dalam melakukan studi mengenai hubungan antar variabel. Metode VAR digunakan untuk menganalisis dampak perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya. VAR adalah suatu model yang digunakan untuk mempelajari dinamika perekonomian setelah terjadi *shock* dari suatu kebijakan dan telah menjadi metode standar dalam studi empiris makro ekonomi. VAR merupakan suatu sistem persamaan dinamis dimana setiap variabel didalam sistem tergantung kepada pergerakan variabel tersebut, dimasa lalu dan semua variabel lainnya didalam sistem.

Metode VAR dalam mempelajari dinamika perekonomian telah dilakukan oleh Kaufman dan O'Connell, Roscer dan Sheehen (1986), Kakex (1998), Robinson (1998), Ozcicek dan McMilin, Kroiziq (2000), Ahlgren (2002), Holtmooler (2002), Boulila dan Trabelsi (2002), Valle (2002), Bernanke, Boivin (at.al) (2003), Yamashita (2003), Ana dan McKibbin (2005), Burgstaller (2005), Hassan dan Islam (2005), Eklund (2007), Penandara (2007), Rahman dan Younus (2007), Solichah (2007), Sudjono (2007), dan Lindiawatie (2007). Studi yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mempelajari dinamika perubahan yang terjadi pada suatu variabel terhadap variabel lainnya.

Studi yang berhubungan dengan variabel ekonomi makro dilakukan oleh Kaufman dan O'connell, Roscer dan Sheehen (1986), Kakex (1998), Robinson (1998), Ozcicek dan McMilin, Kroiziq (2000), Ahlgren (2002), Holtemooler (2002), Boulila dan Trabelsi (2002), Valle (2002), Bernanke, Boivin (at.al) (2003), Yamashita (2003), Ana dan McKibbin (2005), Burgstaller (2005), Hassan dan Islam (2005), Priaga dan Ratnawati (2006), Eklund (2007), Penandara (2007), Rahman dan Younus (2007), Solichah (2007), Sudjono (2007), dan Lindiawatie (2007). Kemudian studi yang berhubungan dengan hubungan perbankan dengan variabel ekonomi makro telah dilakukan oleh Wiemer (2008), Yunita (2008), Solichah (2007), Lindiawatie (2007), Priaga dan Ratnawati (2006), Almilia dan Utomo (2006), Boulila dan Trabelsi (2002), Ahmad (2000), Kakes (1998). Penelitian yang dilakukan berhubungan dengan hubungan antara perbankan dengan perubahan variabel ekonomi makro. Seperti: peredaran uang, kurs, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi.

Hasil penelitian yang berhubungan secara langsung dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Lindiawatie (2007), Pariyo (2004), dan Ahmad (2000). Sebab penelitian yang dilakukan berhubungan dengan perbankan syariah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudjono (2007) menjadi berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam menggunakan model VAR serta penggunaan variabel ekonomi makro.

Sedangkan penelitian yang lain menjadi acuan dalam penggunaan model VAR. Penelitian tersebut adalah: Kaufman dan O'connell, Roscer dan Sheehen (1986), Robinson (1998), Ozcicek dan McMilin, Kroiziq (2000), Ahlgren (2002), Holtemooler (2002), Boulila dan Trabelsi (2002), Valle (2002), Bernanke, Boivin (at.al) (2003), Yamashita (2003), Ana dan McKibbin (2005), Burgstaller (2005), Hassan dan Islam (2005), dan Sudjono (2007).

Penjabaran dari hasil penelitian yang berhubungan secara langsung dalam penelitian ini akan dijabarkan secara lengkap pada sub bab tinjauan literatur penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan bentuk penelitian yang akan dilakukan serta perbedaannya.

2.4.1. Model VAR dan Variabel Ekonomi Makro

Pariyo (2004) melakukan analisis tentang pengaruh variabel makro ekonomi yang terdiri atas: 1) SBI, 2) Valuta Asing (USD), dan 3) SWBI terhadap dana pihak ketiga (studi kasus Bank Muamalat Indonesia periode 2000-2003) dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda, hasil yang diperoleh menunjukkan semua variabel *independent* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *dependent* (DPK). Selain itu dalam pengujian F test dimana nilai F test = 15,311 dan dari *print output* juga terlihat signifikan 0,00 berarti ketiga variabel *independent* (SBI, Valas USD, dan SWBI) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga. Nilai *R-Square* yang diperoleh sebesar 0,541 berarti variabel *independent* penelitian (SBI, SWBI, dan USD) dapat menjelaskan variabel *dependent* (DPK) sebesar 54,1% sisanya 45,9% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel *independent* yang digunakan.

Temuan Pariyo (2004) ini sejalan dengan hasil penelitian Haron dan Shanmugam (1995), yaitu hubungan tingkat suku bunga bank konvensional dan DPK yang di himpun. DPK dan SBI-1 mempunyai korelasi yang negatif. Hal ini berarti bahwa jika SBI-1 mengalami kenaikan, Maka DPK bank syariah akan turun. Sebaliknya apabila SBI-1 rendah, Maka jumlah DPK bank syariah akan meningkat. Dengan kata lain, saat SBI naik, Maka DPK akan tersalurkan kepada bank umum konvensional dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudjono (2007) mengenai hubungan simultan antara variabel ekonomi makro terhadap indeks harga saham. Penelitian yang dilakukan oleh sudjono bertujuan menguji secara empiris keseimbangan jangka panjang maupun hubungan simultan antara variabel ekonomi makro terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini menggunakan model kointegrasi (*Cointegrasi*), *Vector Autoregressive* (VAR) maupun *Error Correction Model* (ECM). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari IHSG, bunga deposito (satu bulan maupun dua belas bulan) SBI, jumlah

uang beredar (M1 dan M2), kurs, dan tingkat inflasi dengan menggunakan data bulanan periode Januari 1990 sampai dengan Desember 2001.

Model yang dibuat Sudjono adalah sebagai berikut:

$$R_{it} = a_i + b_{i1}F_{it} + b_{i2}F_{2t} + \dots + b_{ik}F_{kt} + e_{it} \quad (2.4.1)$$

Dimana :

R_{it} : *return* saham i pada periode t

F_{it} : variabel (faktor) yang dimasukkan kedalam model saham i pada periode t

F_{kt} : variabel (faktor) yang dimasukkan kedalam model saham i pada periode t

a_i : konstanta

b_{i1} : koefisien yang akan diestimasi saham i pada periode t

b_{ik} : koefisien yang akan diestimasi saham i pada periode t

e_{it} : *error term* suatu saham i pada periode t

Tahapan (dan hasil yang diperoleh) dalam penelitian yang dilakukan Sudjono adalah melakukan pengujian terhadap data penelitian yang digunakan, yaitu:

- 1) Uji *stationary*, dari hasil uji *stationary* data yang digunakan belum stasioner baik dengan model grafik, korelogram, maupun akar unit (*unit root*) yaitu menolak H_0 , sedangkan data pada 1st *diffrence* dari ketiga model tersebut telah *stationary*. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa data ekonomi makro yang runtut waktu pada umumnya *nonstationary* Rao (1994), enders (1995), Hermanto (1998), Gujarati (1999), maupun penelitian lainnya
- 2) Uji *Granger Causality*, menurut Gujarati (1995) maupun Greene (2000) sebelum dilakukan analisis kointegrasi, VAR maupun ECM perlu dilakukan pengujian kausalitas (*causality*) antara variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian, uji kausalitas menggunakan metode *Granger Causality* (Granger, 1969). Dari delapan variabel penelitian setelah dilakukan *Granger Causality Test* pada tingkat

signifikansi 5 % ternyata sebanyak empat variabel yang tidak menolak H_0 yang berarti terdapat hubungan kausalitas di antara variabel-variabel tersebut, yaitu: IHSG, Depo 1, SBI, dan kurs. Oleh karena itu variabel-variabel lain yang tidak memenuhi syarat dari *Granger Causality Test* dikeluarkan dari model, yaitu: Deposito 12, M1, M2, dan Inflasi.

- 3) Uji Panjang *Lag*, sebagaimana prinsip parsimoni (*parsimony*), asumsi yang digunakan oleh Johansen's, *cointegration test* adalah mencari *log likelihood test* statistik atas persamaan VAR maupun ECM. Dari rekapitulasi *log likelihood* dari persamaan ECM dan VAR mulai *lag* 1 s/d *lag* 12 untuk periode 1990 : 1 s/d 1997 : 07, *log likelihood ratio* terkecil pada *lag* 3; sedangkan periode 1997 : 8 s/d 200 : 12 *log likelihood ratio* terkecil pada *lag* 12
- 4) Uji Kointegrasi, sebagaimana disebutkan oleh beberapa penulis, misalnya Gujarati (1995), Enders (1995) maupun penulis lainnya bahwa pengujian kointegrasi ini valid jika dilakukan pada data asli. Dari pengujian kointegrasi periode 1990:01 s/d 2000:12 kesimpulan yang dibuat pada rank 0 adalah tidak menolak hipotesis nol bahwa tidak ada vektor yang terkointegrasi, dan menolak hipotesis alternatif bahwa terdapat satu, dua, atau tiga vektor yang terkointegrasi. Selanjutnya digunakan rank 1 kesimpulan yang dibuat adalah menolak hipotesis nol, yaitu terdapat dua atau tiga vektor yang terkointegrasi dan tidak menolak hipotesis alternatif. Dari pengujian kointegrasi tersebut nilai *eigen value* menurun dengan tajam, jika penurunan ini tidak diperhatikan akan sangat menyesatkan hubungan jangka pendek dalam sistem. Apa yang terjadi? Setelah dilakukan pengecekan data, penurunan terjadi karena pada pertengahan 1998 ada kenaikan yang luar biasa terhadap variabel-variabel deposito 1bln SBI maupun kurs (krisis moneter). Dengan kata lain bahwa hasil ini menunjukkan bahwa adanya kejadian-kejadian *non-monetary* maupun peristiwa politik yang sangat berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel IHSG, Depo 1, SBI maupun kurs.

- 5) Model empiris dari VAR, Penggunaan metode VAR merupakan alternatif untuk mengatasi jika terdapat hubungan kausalitas antara variabel-variabel penelitian yang tidak dapat dilakukan dengan model OLS *bivariate*. Hasil estimasi VAR untuk peramalan periode 1990:01 s/d 2000:12 pada *lag* sembilan variabel IHSG bergerak antara 480 sampai dengan tertinggi sebesar 500. Variabel bunga deposito satu bulan berkisar 8 persen sampai dengan 10 persen. Variabel bunga SBI untuk peramalan berkisar antara 10 persen sampai dengan 12 persen. Sedangkan variabel kurs untuk kepentingan peramalan berkisar antara Rp 7.800 sampai dengan Rp. 8.000. Dari analisis *response to one S.D. innovation* maupun *variance decomposition* dari VAR periode 1990:01 s/d 2000:12 terbukti bahwa variabel nilai kurs lebih mampu (andal) dalam menjelaskan hubungan (pengaruhnya) terhadap IHSG, Depo 1, SBI, maupun nilai kurs sendiri. Hal ini terbukti dari *forecast error variance* dari rupiah yang dapat dijelaskan oleh rupiah sendiri. Sedangkan model VAR untuk periode 1990:1 sampai dengan 1997:07 maupun 1997:08 sampai dengan 2000:12 tidak dapat mengungkapkan hubungan dari variabel-variabel tersebut karena jumlah pengamatan yang terlalu pendek (Makaridakis, Wheelwright dan McGee, 1983).
- 6) Model Empiris dari *Error Correction Model*, pengujian ECM periode 1990:01 s/d 2000:12 pada *lag* sembilan variabel IHSG bergerak antara 450 sampai dengan tertinggi 455. Variabel Depo 1 bergerak antara 8 persen sampai dengan 10 persen. Variabel SBI bergerak SBI berkisar antara 16 persen sampai dengan 18 persen. Sedangkan variabel Rupiah bergerak antara Rp. 7.800 sampai dengan Rp. 8.000. Dari analisis *response to one S.D innovation* maupun *variance decomposition* dari ECM periode 1990:01 s/d 2000:12 terbukti bahwa variabel kurs lebih mampu (andal) dalam menjelaskan hubungan (pengaruhnya) terhadap IHSG. Depo 1, SBI, maupun Rupiah sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Lindiawati (2007) mengenai dampak eksternal dan internal perbankan syariah Indonesia terhadap pembiayaan macet dengan menggunakan analisis *impulse response function*

dan *variance decomposition*. Data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lindiawati adalah data *time series* dengan periode waktu 2001 : 01 sampai dengan 2006 : 06. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel eksternal dan variabel internal. Variabel eksternal terdiri dari bunga, inflasi, dan GDP. Alasan dari pengambilan ketiga variabel eksternal tersebut mengacu kepada penelitian sebelumnya. Sedangkan variabel internal terdiri dari FDR, modal dan pembiayaan.

Model yang dibuat oleh Lindiawati sebagai berikut:

$$1. \text{ Persamaan model VAR : } Y_t = \mu + \Gamma_1 Y_{t-1} + \dots + \Gamma_p Y_{t-p} + \epsilon_t \quad (2.4.2)$$

Dimana: Y_t : matriks $n \times 1$ dari variabel endogen

μ : matriks $m \times 1$ dari variabel eksogen

Γ : matriks koefisien yang diestimasi

ϵ : matriks $n \times 1$ dari *error term*

$$2. \text{ Persamaan model Impulse Response Function (IRF) :}$$

$$Y_{1t} = a_{11}Y_{1t-1} - a_{12}Y_{2t-1} + \epsilon_{1t} \quad (2.4.3.)$$

$$Y_{2t} = a_{21}Y_{1t-1} - a_{22}Y_{2t-1} + \epsilon_{2t} \quad (2.4.4.)$$

Pada periode t , *shock* pada ϵ_{1t} mempunyai efek langsung dan penuh (*one for one*) terhadap Y_{1t} tetapi tidak mempunyai pengaruh terhadap Y_{2t} . Pada periode $t + 1$, *shock* pada Y_{1t} tersebut akan berpengaruh terhadap variabel y_{1t+1} melalui persamaan 1 dan berpengaruh terhadap variabel y_{2t+1} melalui persamaan 2. Efek dari *shock* ϵ_{1t} tersebut akan terus bekerja pada periode $t - 2$, kemudian $t + 3$ dan seterusnya. Jadi efek suatu *shock* dalam VAR akan membentuk rantai reaksi sepanjang waktu terhadap semua variabel yang digunakan dalam model.

Tahapan yang dilakukan dan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Lindiawati, sebagai berikut:

1. Melakukan konversi data GDP dari triwulan menjadi data bulanan dengan menggunakan teknik *cubic-spline interpolation*.

2. Membagi setiap variabel yang memiliki satuan nominal rupiah dengan *Consumer Price Index* (CPI) atau Indeks Harga Konsumsi (IHK) lalu dikalikan 100. IHK yang digunakan adalah IHK dengan tahun dasar 2000.
3. Mengubah data bunga nominal menjadi data bunga riil. Dengan cara : Bunga riil = bunga nominal - inflasi (Mankiw, 2001 : hal 161).
4. Mencari inflasi, dengan cara :
$$\text{Inflasi} = \frac{\text{CPI}_t - \text{CPI}_{t-1}}{\text{CPI}_{t-1}}$$
5. Uji Stasioneritas Philip Peron, Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan untuk estimasi lebih lanjut bersifat stasioner atau tidak, karena data yang tidak stasioner akan menghasilkan analisis yang tidak valid. Pada pengujian tingkat level semua data tidak stasioner, oleh karena itu dilanjutkan tahapan *first differencing*, supaya dapat digunakan untuk estimasi lebih lanjut. Dari hasil pengujian tahap lanjut diketahui bahwa semua data bersifat stasioner pada level yang sama, kecuali GDP stasioner pada level 10%. Karena semua data telah stasioner pada 1st *diffrencing*, dengan demikian data yang digunakan telah memiliki sifat rata-rata konstan, seimbang, sehingga data tersebut dapat digunakan untuk tahap estimasi dan analisis VAR tingkat lanjut.
6. Penentuan Panjang Optimum *Lag*, pada analisis *time series*, *lag* memegang fungsi penting dan sensitif karena metode VAR bersifat dinamis, juga karena ada faktor masa lalu yang turut menjadi variabel. Dengan demikian metode VAR sangat sensitif terhadap jumlah *lag*. Pemilihan panjang *lag* yang tepat merupakan sesuatu hal yang kritis, karena disamping mempertimbangkan standar kriteria nilai yang paling rendah, juga mempertimbangkan keterbatasan *series* yang ada. Untuk menentukan panjang *lag*, dimulai dengan panjang *lag* terpanjang yang masuk akal atau panjang *lag* terpanjang yang fisibel dengan mempertimbangkan derajat kebebasan. Kriteria yang digunakan untuk menentukan

optimum *lag* pada penelitian ini adalah kriteria AIC. Alasan digunakan indikator AIC sebagai penentu *lag* optimum yang paling baik dibandingkan dengan SIC adalah:

- a. AIC mengandung penalti yang meningkatkan fungsi dari sejumlah parameter yang diestimasi.
- b. Penalti parameter-parameter bebas AIC sedikit lebih kuat daripada kriteria SIC (*Schwartz Information Criterion*).
- c. Metode AIC berusaha untuk menemukan model yang terbaik yang mampu menjelaskan data dengan parameter-parameter bebas yang minimum.
- d. Metode maksimum (*log likelihood*) pada AIC bisa digunakan untuk mengestimasi nilai-nilai parameter.

Berdasarkan kriteria AIC, Maka *lag* 5 ditetapkan sebagai *lag* yang paling optimum dalam penelitian ini. Dengan demikian, *lag* 5 memenuhi persyaratan untuk dianalisis lebih lanjut. Sebelum melangkah kepada analisis *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition*, *lag* 5 terlebih dahulu akan mengalami uji stabilitas.

7. Uji stabilitas VAR, uji stabilitas diperlukan untuk mengetahui valid tidaknya analisis *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition*. Apabila hasil estimasi VAR tidak stabil, Maka *Impulse Response Function* dan *Variance decomposition* tidak valid. Sebaliknya jika estimasi VAR stabil, Maka dapat digunakan untuk analisis *Impulse Response Function* dan *Variance Decomposition*. *Lag* 5 dipilih sebagai *lag* optimum, selanjutnya *lag* 5 diuji stabilitasnya. Untuk menguji stabil tidaknya estimasi VAR *stability condition Check* berupa *roots of characteristic polynomial* terhadap seluruh variabel yang digunakan dikalikan jumlah *lag* dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini jumlah variabel yang digunakan sebanyak sebanyak 7 variabel dengan *lag* sebesar 5, sehingga jumlah *root* yang diuji sebanyak $7 \times 5 = 35$. Kondisi stabil tidaknya dapat dibuktikan dari 35 *root* yang diuji mempunyai

modulus kurang dari 1 atau dengan kata lain jika semua akar dari fungsi polinomial tersebut berada dalam unit *circle*. Sebaliknya untuk *lag* yang tidak stabil diantara akar-akarnya terdapat nilai modulus yang lebih dari 1 serta berada di luar unit *circle*. Mengingat semua persyaratan dalam uji stabilitas telah terpenuhi, dengan demikian analisis lebih lanjut VAR dapat dilanjutkan dengan nilai lag yang sama dengan lima.

8. Estimasi VAR, metode VAR melibatkan faktor *lag* atau waktu untuk menilai hubungan diantara periode-periode yang telah lalu terhadap suatu variabel di masa sekarang. Berdasarkan hasil *output* terlihat ada hubungan periode yang lalu terhadap beberapa variabel. Semua variabel memiliki keberhubungan dengan periode-periode yang telah lalu. Variabel-variabel tersebut adalah pembiayaan/kredit macet dipengaruhi oleh pembiayaan macet pada periode dua dan lima bulan yang lalu. GDP dipengaruhi oleh GDP itu sendiri pada satu dan empat bulan yang lalu, dan pembiayaan pada periode lima bulan sebelumnya, serta pembiayaan macet pada dua, empat dan lima bulan sebelumnya. Inflasi dipengaruhi oleh bunga pada dua, empat dan lima bulan sebelumnya, inflasi itu sendiri pada dua bulannya sebelumnya, serta modal pada periode lima bulan sebelumnya. FDR dipengaruhi inflasi dan bunga pada periode lima bulan sebelumnya serta GDP pada satu bulan sebelumnya. Modal dipengaruhi oleh pembiayaan macet pada periode tiga dan empat bulan sebelumnya. Kredit atau pembiayaan dipengaruhi oleh variabel pembiayaan macet pada satu bulan sebelumnya, pembiayaan itu sendiri pada dua, tiga, dan lima bulan sebelumnya, inflasi pada empat bulan sebelumnya, FDR pada satu bulan sebelumnya serta bunga empat bulan. Bunga dipengaruhi oleh pembiayaan macet pada periode satu, tiga, empat dan lima bulan sebelumnya. Hasil estimasi VAR melalui koefisien-koefisiennya tidak dijelaskan lebih mendalam, karena penelitian ini menekankan pada analisis *Impulse Response Function* dan

Variance Decomposition.

9. Analisis *Impulse Response Function*, analisis ini berguna untuk mengetahui dampak dari suatu variabel apabila terjadi *shock* terhadap suatu variabel yang lain. Masing-masing variabel memberikan respon yang berbeda apabila terjadi *shock* pada variabel tertentu. Dari hasil *Impulse Response Function* dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh *shock* kredit/pembiayaan macet terhadap pembiayaan lebih besar daripada pengaruh *shock* kredit/pembiayaan terhadap *shock* kredit/pembiayaan macet. Pengaruh *shock* FDR terhadap pembiayaan macet lebih kecil daripada pengaruh *shock* pembiayaan macet terhadap FDR. Pengaruh *shock* pembiayaan macet terhadap total modal sama besarnya dengan pengaruh *shock* modal terhadap pembiayaan macet, tetapi periode fluktuasi yang berbeda. Pengaruh *shock* pembiayaan macet terhadap GDP lebih besar daripada pengaruh *shock* GDP terhadap pembiayaan macet, tetapi periode fluktuasinya sama dengan periode fluktuasi respon pembiayaan macet terhadap *shock* GDP. Pengaruh *shock* pembiayaan macet terhadap inflasi lebih besar daripada pengaruh *shock* inflasi terhadap pembiayaan macet. Pengaruh *shock* suku bunga terhadap pembiayaan macet lebih kecil daripada pengaruh *shock* pembiayaan macet terhadap suku bunga.
10. Analisis *Variance Decomposition*, analisis ini digunakan untuk mengetahui *shock* mana yang paling besar pengaruhnya terhadap pembiayaan macet. *Shock* yang paling mendominasi dalam menjelaskan pembiayaan macet yaitu, modal dan pembiayaan macet. *Shock* yang paling mendominasi dalam menjelaskan pembiayaan macet yaitu, modal, dan pembiayaan macet. *Shock* yang dominan kaitannya terhadap pembiayaan adalah pembiayaan itu sendiri, modal dan bunga. *Shock* yang paling dominan hubungannya dalam menjelaskan variabel FDR adalah FDR, GDP dan pembiayaan. *Shock* yang paling besar dominasinya terhadap

modal adalah modal, pembiayaan macet dan bunga. *Shock* yang paling besar dominasi hubungan dengan inflasi adalah modal, inflasi dan pembiayaan macet. Sedangkan *shock* yang paling besar pengaruhnya terhadap GDP adalah GDP, pembiayaan macet dan bunga. *Shock* yang paling besar nilainya berarti variabel tersebut yang paling berperan dalam menjelaskan suatu variabel lain. Melalui analisis *Variance Decomposition* ini, Maka tujuan penelitian tercapai yaitu mengetahui faktor mana yang paling mendominasi dalam mempengaruhi atau mempunyai hubungan erat dengan pembiayaan macet.

11. Dampak *Shock* Eksternal terhadap Pembiayaan Macet, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang positif. Artinya apabila terjadi peningkatan pembiayaan macet, Maka terjadi *shock* atau perubahan yang besar pada faktor eksternal.
12. Dampak *Shock* Internal terhadap Pembiayaan Macet, hubungan yang terjadi bersifat negatif artinya, peningkatan pembiayaan macet akan menurunkan modal bank, FDR dan pembiayaan. Bank harus mengalokasikan sebagian besar modalnya untuk menanggung *default* kredit. Proses intermediasi atau FDR akan terganggu, yang dicirikan dengan menurunnya penyaluran pembiayaan.

Selanjutnya penelitian dilakukan penulis menggunakan variabel ekonomi makro yang terdiri dari GDP, inflasi, kurs, dan SBI-satu bulan. Variabel ekonomi makro yang digunakan dalam penelitian ini telah digunakan oleh Sudjono(2007) dan Lindiawati (2007). Sedangkan variabel NPF dan FDR yang telah digunakan oleh Lindiawati (2007). Dalam menjawab pertanyaan penelitian pada bab satu, penulis menggunakan analisis VAR namun lebih menekankan kepada analisis *impulse response function* dan *variance decomposition*. Penggunaan analisis VAR ini telah digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lindiawati (2007).

Perbedaan dan penambahan yang utama antara bentuk penelitian

yang dilakukan oleh penulis dengan bentuk penelitian sebelumnya, ialah:

- a. Studi yang dilakukan oleh Ahmad (2000) mengkaji efektivitas instrumen-instrumen moneter dalam sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Malaysia. Dalam studinya, Ahmad mencoba mengembangkan dan mendefinisikan instrumen-instrumen moneter dalam sistem perbankan ganda di Malaysia serta mengevaluasi permintaan terhadap instrumen-instrumen. Periode waktu data yang digunakan mulai Januari 1994 - Desember 1999 berupa data bulanan. Variabel yang digunakan terdiri dari uang beredar (M1 dan M2) pada bank konvensional dan bank syariah, dan jumlah kredit yang disalurkan pada bank syariah dan bank konvensional. Tujuan dari penelitian Ahmad (2000) untuk mengkaji efektivitas instrumen-instrumen moneter dalam sistem perbankan ganda (*dual banking sistem*). Metodologi yang digunakan adalah metodologi regresi berganda.
- b. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pariyo (2004), pada penelitian Pariyo (2004) periode data yang digunakan mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 berupa data bulanan. Metodologi yang digunakan adalah regresi berganda. Variabel yang digunakan dalam penelitian Pariyo (2004) terdiri dari DPK BMI, SWBI, kurs dan SBI. Kemudian yang terakhir tujuan dari penelitian Pariyo (2004) untuk menganalisa pengaruh variabel ekonomi makro terhadap DPK yang dihimpun oleh BMI. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terdiri dari: jumlah variabel, periode waktu data yang digunakan, tujuan penelitian yang dilakukan dan metodologi penelitian.

VAR adalah suatu model yang digunakan untuk mempelajari dinamika perekonomian setelah terjadi *shock* dari suatu kebijakan dan telah menjadi metode standar dalam studi empiris makro ekonomi. VAR merupakan suatu sistem persamaan dinamis dimana setiap variabel didalam sistem tergantung kepada pergerakan variabel tersebut, dimasa lalu dan semua variabel

lainnya didalam sistem.

- c. Perbedaan dengan Sudjono (2007), Sudjono (2007) mengenai hubungan simultan antara variabel ekonomi makro terhadap indeks harga saham. Penelitian yang dilakukan oleh sudjono bertujuan menguji secara empiris keseimbangan jangka panjang maupun hubungan simultan antara variabel ekonomi makro terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini menggunakan model kointegrasi (*Cointegrasi*), *Vector Autoregressive* (VAR) maupun *Error Correction Model* (ECM). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari IHSG, bunga deposito (satu bulan maupun dua belas bulan) SBI, jumlah uang beredar (M1 dan M2), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan tingkat inflasi dengan menggunakan data bulanan periode Januari 1990 sampai dengan Desember 2001. Penelitian yang dilakukan penulis tidak menggunakan variabel IHSG, bunga deposito, M1 dan *Error Correction Model* (ECM).
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Lindiawati (2007) mengenai dampak eksternal dan internal perbankan syariah Indonesia terhadap pembiayaan macet dengan menggunakan analisis *impulse response function* dan *variance decomposition*. Data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lindiawati adalah data *time series* dengan periode waktu 2001 : 01 sampai dengan 2006 : 06. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel eksternal dan variabel internal. Variabel eksternal terdiri dari bunga, inflasi, dan GDP. dan variabel internal terdiri dari FDR, modal dan pembiayaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai hubungan fluktuasi variabel ekonomi makro terhadap NPF dan FDR yang dilakukan oleh BMI. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lindiawati dengan penulis lakukan adalah metodologi yang digunakan yakni dengan VAR dan penggunaan variabel GDP, inflasi, kurs, dan SBI.